

ABSTRAK

MARAKNYA MUCIKARI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI YANG MERESAHKAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMENEP

Oleh : Bella Nur Alifah

Dosen Pembimbing Utama : Sutrisni, S.H., M.H

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H

Masyarakat Indonesia yang dikenal dengan beragam budaya, suku, bahasa dan orangnya yang ramah, beretika bermoral saat ini mulai rendah dengan masuknya kebudayaan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang menjerumuskan kedalam dunia tindak pidana prostitusi. Salah satunya di Sumenep masih banyaknya mucikari yang berkeliaran, dengan faktor penyebab utama dari salah satunya adalah faktor ekonomi.

Permasalahan di Kabupaten Sumenep adalah upaya pemerintah dalam penanggulangan pencegahan, dan pemberantasan yang akan dilakukan aparat penegak hukum. Dengan tujuan agar mucikari maupun prostitusi mengurangi dan dapat diberantas agar tidak ada lagi mucikari yang berkeliaran di Kabupaten Sumenep.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan beberapa sumber hukum yaitu primer, sekunder dan tersier.

Adanya praktek prostitusi bagi masyarakat akan menimbulkan keresahan, ketentraman dan ketertiban umum. Tidak dapat dipungkiri lagi walaupun warga Kabupaten Sumenep merasa tidak menerima adanya praktek prostitusi yang dapat mencoreng nama baik Kabupaten ini. Peran masyarakat ,keluarga, lingkungan maupun instansi yang berhubungan dengan praktek prostitusi sangat berperan dalam upaya pencegahan yang akan dilakukan, tidak hanya itu pemerintah juga berperan dengan instansi dinas kesehatan, dinas sosial mensosialisasikan dampak-dampak dan pembinaan rehabilitasi, pembinaan kerja. Sedangkan upaya pemberantasan yang dilakukan ketika masyarakat sekitar melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan aparat dengan melakukan penggerebekan dan razia/oprasi gabungan, juga dengan pemidanaan yang diberikan lebih tegas menurut KUHP maupun Perda dan Undang-Undang lain yang bersangkutan.

Bagi pemerintah agar melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada daerah-daerah yang memang rawan akan prostitusi. Dan bagi aparat penegak hukum dalam pemberantasan agar lebih tegas dengan setiap hari terjun ke lapangan melakukan patroli maupun razia gabungan di lokasi rawan praktek prostitusi, juga lebih tegas dalam pemidanaan agar RUU juga diperbaharui maupun dibuat Undang-Undang tentang prostitusi agar sadar dan lebih jera.

Kata Kunci : *Masyarakat, mucikari, tindak pidana prostitusi, pemidanaan, aparat penegak hukum*

ABSTRACT

THE MEASURE OF MUCIKARI AS A PROSTITUSI CRIMINAL ACTION FOLLOWING THE PEOPLE IN SUMENEP DISTRICT

By : Bella NurAlifah

Main Advisor :Sutrisni, S.H., M.H.

Supervising Lecturer :Moh. Zainol Arief, S.H., M.H

Indonesian society, which is known for its diverse cultures, ethnicities, languages and friendly people, has high moral standards at the moment with the introduction of culture or habits that have plunged into the world of prostitution. One of them is in Sumenep there are still many pimps roaming around, with the main contributing factors to one of them being economic factors.

The problem in Sumenep Regency is the government's efforts to prevent and eradicate prostitution by law enforcement officials. With the aim that pimps and prostitution reduce and can be eradicated so that no more pimps roam in Sumenep Regency.

The research method used in writing this thesis is to use a normative approach to the law, the case approach, and several sources of law, namely primary, secondary and tertiary.

The existence of the practice of prostitution for the community will lead to unrest, peace and public order. It cannot be denied even though Sumenep Regency residents do not accept the existence of prostitution that can tarnish the good name of this Regency. The role of the community, family, environment and institutions related to the practice of prostitution plays a significant role in the prevention efforts that will be carried out, not only that the government also plays a role with the health service agency, the social service socializes the impacts and fostering rehabilitation, and fostering work. While the eradication efforts carried out when the surrounding community reports to the authorities, and the authorities by conducting raids and joint raids / operations, also with the punishment provided more stringently according to the Criminal code or the Perda and other relevant Laws.

For the government to conduct socialization or counseling to areas that are prone to prostitution. And for law enforcement officials in the eradication to be more assertive by going into the field every day to conduct joint patrols and raids on locations prone to prostitution practices, also more assertive in criminalization so that the bill is also renewed or the Law on prostitution made awer and more deterrent.

Keywords : *Society, pimps, criminal acts of prostitution, conviction, law enforcement officers*